PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) OPD

TAHUN 2017

KECAMATAN YOSOWILANGUN

KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR – ISI

halaman

BAB	I	PENDAHULUAN	
		LATAR BELAKANG	1
		MAKSUD DAN TUJUAN	1
		KONDISI UMUM KECAMATAN YOSOWILANGUN	2
		Letak Geografis	2
		Topografi	2
		Demografi	3
		Kelembagaan / Struktur Organisasi	3
		Personalia	6
		Isu strategis dan masalah mendesak	7
BAB	II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
		A. PERENCANAAN STRATEGIS	9
		VISI	9
		MISI	10
		TUJUAN DAN SASARAN	10
		B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TAHUN 2017	12
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA 2017	15
BAB	IV	PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai keikhlasan dari setiap daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016, Peraturan Daerah tentang SOTK No. 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati No, 86 Tahun 2016 tentang Pemerintahan pada Kecamatan dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2014 tentang RPJM, banyak hal yang berkaitan dengan kelembagaan organisasi pemerintah, hal ini tentunya berdampak pada perubahan tatanan organisasi pemerintah menuju arah yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat, menuju pada kesejahteraan masyarakat. Didalam amanat peraturan pemerintah dimaksud, penerapannya membatasi kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk satuan kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta untuk mensinergikan potensi wilayah sehingga sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut diadakan perubahan-perubahan yang sifatnya bukan pengaturan tetapi bersifat penataan sesuai dengan keadaan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan maka kedepan perlu dilakukan perubahan perilaku dan sikap sebagai unsur birokrasi, yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta penyampaian system manajemen organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untu memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Yosowilangun atau laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD Kecamatan Yosowilangun.

Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai dalah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

C. KONDISI UMUM KECAMATAN YOSOWILANGUN

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	81,30 KM2
2	Banyaknya Desa	12 Desa
3	Banyaknya penduduk	56.546 jiwa
4	Kepadatan penduduk	/ KM2
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	20.576 KK
6	Ketinggian	50 dpl
7	Batas-batas : • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat	 Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Jember Samudra Indonesia Kecamatan Kunir
8	Tanah : Tanah sawah irigasi teknis *Tanah tegal / kering* Tanah pekarangan	 Ha. *Ha.* Ha.

2. Topografi

Kecamatan Yosowilangun terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Darungan
2. Desa Kraton
3. Desa Wotgaliih
4. Desa Tunjungrejo
5. Desa Yosowilangun Kidul
6. Desa Yosowilangun Lor
7. Desa Krai
8. Desa Karangayar
9. Desa Karangrejo
10. Desa Munder

3. Demografi

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Darungan	1.974	2.019	3.993
2	Desa Kraton	1.157	1.273	2.430
3	Desa Watgalih	3.439	3.645	7.084
4	Desa Tunjungrejo	1.001	990	1.991
5	Desa Yosowilangun Kidul	4.059	4.318	8.377
6	Desa Yosowilangun Lor	3.615	3.947	7.562
7	Desa Krai	3.367	3.626	6.993
8	Desa Karanganyar	1.092	1.129	2.221
9	Desa Karangrejo	1.289	1.396	2.685
10	Desa Munder	2.588	2.731	5.319
11	Desa Kebonsari	1.335	1.403	2.738
12	Desa Kalipepe	2.511	2.642	5.153
	Jumlah	27.427	29.119	56.546

4. Kelembagaan/Stuktur Organisasi

a. **Struktur Organisasi**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Yosowilangun yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN YOSOWILANGUN

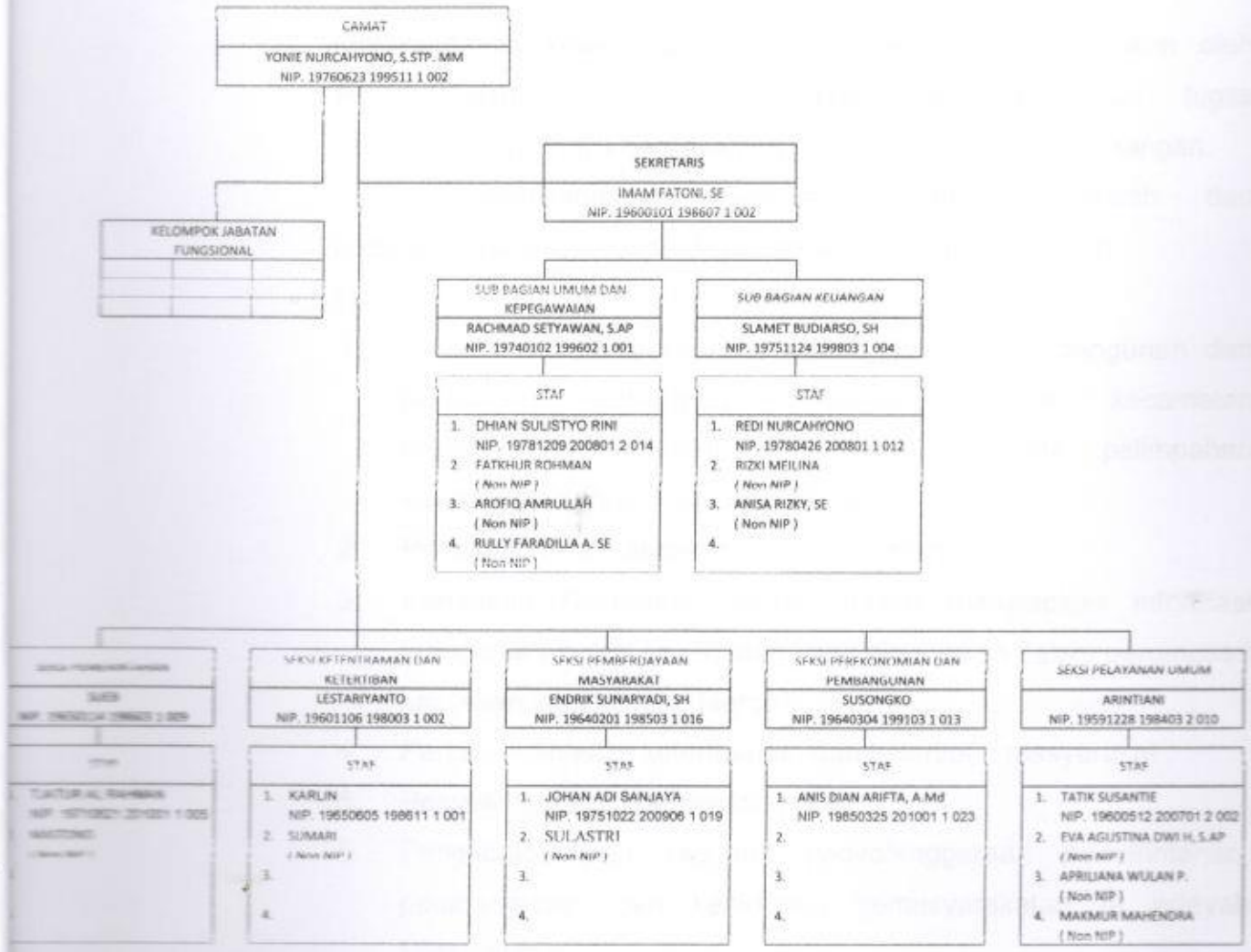

b. Tugas Pokok dan Fungsi :

- Tugas Pokok :

  Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi :

  1. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;
  2. Pemimpin pelaksanaan fungsi kecamatan ;
  3. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi kepala daerah ;
  4. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  5. Penyelenggaraan pelayanan publik ;
  6. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

5. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Yosowilangu, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Yonie Nurcahyono, S.STP, MM NIP. 19760623 199511 1 002	Pembina Tk. I / IVb	Camat
2.	Imam Fatoni, SE NIP. 19600101 198607 1 002	Penata Tk. I / IIId	Sekcam
3.	Endrik Sunaryadi, SH NIP. 19640201 198503 1 016	Penata Tk. I / IIId	Kasi PMD
4.	Sueb NIP. 19650114 198603 1 009	Penata Tk. I / IIId	Kasi Pemerintahan
5.	Susongko NIP. 19640304 199103 1 013	Penata / IIIc	Kasi Ekbang
6.	Arintiani NIP. 19591228 198403 2 010	Penata / IIIc	Kasi Yanmun
7.	Lestarianto NIP. 19601106 198003 1 002	Penata Muda Tk. I / IIIb	Kasi Ketertiban
8.	Rachmad Setyawan, S.AP NIP. 19740102 199602 1 001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Kasubag. Umum & Kepegawaian
9.	Slamet Budiharso, SH NIP. 19751124 199803 1 004	Penata Muda Tk. I / IIIb	Kasubag. Keuangan
10.	Anis Dian Arifta, A.Md NIP. 19850325 201001 1 023	Pengatur Tk. I / IId	Staf
11.	Dhian Sulistyo Rini NIP. 19780426 200801 1 012	Pengatur / IIc	Staf
12.	Johan Adi Sanjaya NIP. 19751022 200906	Pengatur / IIc	Staf
13.	Tjatur Al Rahman NIP. 19710621 201001 1 005	Pengatur Muda TK. I / IId	Staf
14.	Tatik Susantie NIP. 196005 200701 2 002	Pengatur Muda / IIa	Staf
15.	Karlin NIP. 19650605 198611 1 001	Pengatur Muda / IIa	Staf
16.	Sulastri (Non Nip)	-	Staf
17.	Eva Agustina Dwi Hardiyani, S.AP (Non Nip)	-	Staf
18.	Rizki Meilina (Non Nip)	-	Staf
19.	Apriliana Wulan Puspitasari (Non Nip)	-	Staf
20.	Mastono (Non Nip)	-	Staf
21.	Fatkhur Rohman (Non Nip)	-	Staf
22.	Makmur Mahendra (Non Nip)	-	Staf
23.	Arofiq Amrullah (Non Nip)	-	Staf
24.	Sumari (Non Nip)	-	Staf
25.	Anjas Rizky, SE		Staf

6. **Isu strategis dan masalah yang mendesak**

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang
11. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangulangan bencana di daerah bencana.

Di Kantor Kecamatan Yosowilangun sarana dan prasarana pendukung dirasa masih kurang terutama ruang pelayanan kepada masyarakat yang masih belum representative sehingga masyarakat merasa belum nyaman, selain itu komputer sebagai salah satu penunjang, masih kurang memadai, baik jumlah maupun kualitas (komputer lama yang sering ngadat/rusak), sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, demikian juga yang terjadi di desa-desa.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana fisik baik itu jalan, jembatan, plengsengan maupun lain-lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat juga masih perlu untuk diperbaiki, utamanya terhadap jalan yang kondisinya sudah rusak.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan,kemana dan bagaimana Kecamatan Yosowilangun harus dibawa dan berkarya agar dapat melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan Program Kerja utama, antar lain:

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
b. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan;
c. Penataan Administrasi Kependudukan;
d. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguan Desa;
f. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
g. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
h. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
i. Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
l. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
n. Peningkatan Disiplin Aparatur;
o. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
p. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Adapun pernyataan Visi Kantor Kecamatan Yosowilangun adalah:

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang sebesar-besarnya, maka ditetapkanlah *Visi* Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang mengikuti Visi Pemerintah Lumajang Tahun 2015-2019 adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**. Adapun *Misi* yang dilaksanakan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kantor Kecamatan Yosowilangun untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

a. meningkatkan kemandirian Masyarakat melalui peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa yang baik;
b. meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Yosowilangun perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap Misi serta program yang telah ditetapkan. Tujuan dari SKPD Kecamatan Yosowilangun sesuai dengan Misinya, adalah :

a. meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengelolaan pemerintah desa yang baik ;
b. meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat .

b. Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan pemerintahan Desa yang baik dan keberdayaan masyarakat, maka sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan;

e. Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan;
f. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguan Desa;
g. Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa;
h. Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan;
i. Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
k. Terfasilitasinya Kegiatan Sosial Keagamaan.

2.1.4. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Yosowilangun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dialokasikan.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2017 Kantor Kecamatan Yosowilangun, sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2017, Kantor Kecamatan Yosowilangun melaksanakan 16 Program dan 41 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan
Kecamatan Yosowilangun Tahun 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Pengendalian Keamanan Lingkungan; b. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2.	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan).

4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	a. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa; b. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas.
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguan Desa	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
6.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
7.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
8.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fasilitasi Paskibraka
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
10.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
11.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	a. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa; b. Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa.
12.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; i. Penyediaan Makanan dan Minuman; j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pembangunan Gedung Kantor; b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas; d. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; e. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

		f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
[illegible]	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
[illegible]	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
[illegible]	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran; b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Yosowilangun merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Yosowilangun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran *(output)*, sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngemplak dapat berupa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2017.

a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2017, Kecamatan Yosowilangun telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis.

Capaian kinerja Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan beberapa indikator berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja sasaran I

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Penanggungjawab
Nilai IKM	Angka	80	70	80	75	- Sekcam - Kasi Pelayanan

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan beberapa indikator berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Penanggungjawab
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	85	- Camat - Semua Kasi dan Subag

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan beberapa indikator berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Penanggungjawab
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	57	43	57	60	- Kasi Pemerintahan

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2017 yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 206.425.540,-
2. Belanja Langsung Sebesar Rp. 1.644.782.763,-

Jumlah Total Rp. 1.851.208.303,-

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Realisasi	%	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
	Belanja Tidak Langsung	-	**207.267.485**	**206.425.540**	**99,59**	
	- Gaji dan Tunjangan	-	185.987.485	184.545.540		
	- Tambahan Penghasilan PNS	-	21.280.000	21.880.000		
1	**Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**					
	a. Pengendalian Keamanan Lingkungan;	22.770.000	22.770.000	13.912.000	61,10	
	Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	29.720.000	29.720.000	29.720.000	100	
2	**Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan**					
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	

3	**Penataan Administrasi Kependudukan** Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	48.204.000	48.204.000	43.772.000	90,81	
4	**Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** a. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	20.429.750	14.429.750	0	0	Batal
	b. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	10.015.000	10.015.000	9.502.000	94,88	
5	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguan Desa** Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	3.240.000	0	0	0	PAK
6	**Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan** Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	34.920.000	34.920.000	34.337.000	98,33	
7	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan	12.845.000	12.845.000	12.845.000	100	
8	**Peningkatan,Peran Serta Kepemudaan** Fasilitasi Paskibraka	28.875.000	28.875.000	28.800.000	99,74	
9	Perencanaan Pembangunan **Daerah** Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	10.466.000	10.466.000	9.783.500	93,48	
10	**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	6.750.000	6.750.000	6.250.000	92,59	

11	**Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**					
	a. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	187.200.000	187.200.000	166.800.000	89,10	
	b. Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	8.325.000	8.325.000	6.925.000	83,18	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.583.000	77.963.000	75.811.000	97,24	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	33.000.000	33.000.000	27.580.013	83,58	
	c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	124.912.000	124.912.000	123.133.000	98,58	
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.600.000	9.600.000	9.600.000	100	
	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.879.250	37.879.250	37.845.500	99,91	
12	f. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	15.134.500	15.134.500	14.038.750	92,76	
	g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.722.500	6.722.500	6.690.000	99,52	
	h. Penyediaan Logistik Kantor	5.117.400	5.117.400	4.929.000	96,32	
	i. Penyediaan Makanan dan Minuman	87.720.000	87.720.000	66.815.000	76,18	
	j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44.950.000	44.950.000	38.975.000	86,71	
	k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60.500.000	60.500.000	60.490.000	99,98	
	l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	a. Pembangunan Gedung Kantor	610.000.000	610.000.000	453.312.000	74,32	
13	b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	44.000.000	36.600.000	83,18	
	c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	20.740.000	20.740.000	20.740.000	100	
	d. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	

	e. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.655.000	63.655.000	63.450.000	99,68	
	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2.320.400	2.320.400	2.292.000	98,78	
	g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.831.700	6.831.700	6.771.000	99,11	
	h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.224.000	50.084.000	49.127.500	98,09	
	i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	4.530.000	4.530.000	4.250.000	93,82	
	j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.232.500	8.232.500	8.177.500	99,33	
	k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	140.000.000	123.000.000	116.811.000	94,97	
14	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**					
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	
15	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**					
	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	24.200.000	24.200.000	22.090.000	91,28	
16	**Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**					
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.148.000	1.148.000	1.132.000	98,61	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.240.000	4.240.000	3.740.000	88,21	
	TOTAL	**2.117.267.485**	**2.117.267.485**	**1.851.208.303**	**92,88**	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2017, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP). Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Yosowilangun, 20 Pebruari 2018

Camat Yosowilangun

YONIE NURCAHYONO, SSTP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760623 199511 1 002